

Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya

Wisnu Mahendra¹, Yuliatin², Bagdawansyah Alqadri³, Muh. Zubair⁴

PPKn FKIP Universitas Mataram, Kota Mataram, 83125, Indonesia

E-mail Correspondence : hjyuliatin31@gmail.com

Phone number: 085937055334

Abstract. Kurikulum merdeka bertujuan membentuk pelajar berbudi luhur, kompeten, dan kontributif sesuai bidangnya. Salah satu mata pelajaran yang ada pada kurikulum merdeka ialah mata pelajaran PPKn. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya sudah diimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan dengan diimplementasikannya alur tujuan pembelajaran PPKn sebagai landasan atau acuan guru dalam membuat modul ajar PPKn, diimplementasikannya modul ajar PPKn sebagai bahan ajar guru PPKn, dan diimplementasikannya asesmen pembelajaran PPKn sebagai penilaian yang dilakukan oleh guru. Terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya yaitu adanya faktor pendukung berupa adanya dukungan komitmen dari guru PPKn dan kualifikasi guru yang memiliki gelar sarjana S-1 dan adanya sarana dan prasarana. Selain itu, adanya faktor penghambat meliputi kurangnya partisipasi dari siswa, kurangnya jumlah guru PPKn, dan adanya fluktuasi kebijakan pemerintah terkait kurikulum.

Kata Kunci: *Kurikulum Merdeka, Pelajaran, PPKn.*

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu amanat dari konstitusi negara yaitu alenia ke empat UUD 1945, salah satunya melalui pendidikan. Urgensi dari pendidikan sendiri dapat menciptakan generasi yang terdidik. Hal ini tentunya harus didukung oleh sistem yang dibangun secara bersama (Saleh, 2020). Salah satu bagian terpenting dari kehidupan untuk mengisi tujuan hidup bangsa yang merdeka yaitu pendidikan dan harus sejalan dengan perkembangan zaman (Siregar et al., 2020). Dan berkorelasi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari penjelasan undang-undang tersebut ialah tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia secara ideal. Akan tetapi pada faktanya tujuan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena masih banyak permasalahan dibidang pendidikan yang ditemukan (BPS, 2018). Menurut survey dari Program for International Student Assesment (PISA) yang dilakukan pada tahun 2019 literasi Indonesia berada pada tingkat 62 dari 70 negara, artinya bahwa Indonesia berada pada 10 negara dengan tingkat literasi rendah (Kemendiknas, 2021). Sehingga tujuan suci tersebut masih sukar untuk diimplementasikan dengan maksimal dan akan berkorelasi terhadap kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berhubungan erat dengan pendidikan yang menjadi salah satu faktor utamanya (Baro'ah, 2020).

Dari beberapa permasalahan tersebut harus ada upaya untuk memudahkan dan mempercepat tujuan pendidikan nasional, salah satunya dengan hadirnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ialah kurikulum pembelajaran yang berhubungan dengan pendekatan minat, bakat guna perbaikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 (Susilowati, 2022). Kurikulum Merdeka merupakan tawaran guna merekonstruksi sistem pendidikan nasional. Karena di dalamnya terdapat jawaban atas masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran, dikurangi bebannya, dan penyederhanaan RPP salah satunya, tentu guru menjadi yang terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna memajukan bangsa melalui proses pembelajaran (Ilmiah et al., 2020). Walaupun kurikulum merdeka terbilang masih baru, dengan adanya kebijakan kurikulum merdeka ini lambat laun akan menghasilkan habituasi di kalangan pendidik dan/atau pengajar, bahkan siswa. Habituasi ialah kumpulan kumpulan proses yang sering dilakukan secara bertahap dan tidak terlalu disadari (Alqadri et al., 2021).

Implementasi kurikulum merdeka diharapkan menghasilkan pelajar yang berbudi luhur, kompeten dan siap berkontribusi kepada masyarakat sesuai bidangnya (Ainia, 2020). Salah satu mata pelajaran yang ada pada kurikulum merdeka ialah mata pelajaran PPKn. PPKn atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum merdeka dikenal dengan pendidikan pancasila, adapun muatan didalamnya ialah kombinasi dari nilai

pancasila, Undang-undang Dasar 1945, pengetahuan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kewarganegaraan. (Ilham, 2022). Dalam implementasi kurikulum merdeka berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah tahun 2022 tentang implementasi kurikulum merdeka, bahwa implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan dengan menggunakan alur tujuan pembelajaran, modul ajar, proyek penguatan profil pelajar pancasila dan asesmen pembelajaran. Hal tersebut berlaku untuk setiap mata pelajaran, termasuk pada mata pelajaran PPKn.

Berdasarkan data dari Dapodik Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Di Kabupaten Lombok Timur terdapat 96 Sekolah Menengah, 73 diantaranya Sekolah Menengah Atas Negeri dan 23 Sekolah Menengah Swasta, sebanyak 7 Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pringgabaya yaitu SMA Negeri 1 Pringgabaya, SMA Islam Maraqittalimat Pringgabaya, SMA Islam Plus Al Ikhlas NW Pohgading, SMA Islam Plus NW Teko, SMAS Muhammadiyah Pohgading, SMAS NW Permatan dan SMAS NW Pringgabaya (Kemendikbud, 2021).

Berdasarkan data tersebut melihat SMA Negeri 1 Pringgabaya satu satunya sekolah negeri dengan akreditasi terbaik diantara 7 Sekolah Menengah Atas yang ada di Kecamatan Pringgabaya, sampai saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengidentifikasi implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

2. Metodologi

Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam. Dalam jenis penelitian ini, fokus utama adalah pada proses pengumpulan data yang detail dan analisis yang terperinci terhadap informasi yang diperoleh. (Setiawan, 2018). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer ialah yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara kepada informan (Samsu, 2017:94). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru PPKn SMA Negeri 1 Pringgabaya, siswa. Data yang dikumpulkan berupa ungkapan atau pendapat tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya dan faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan data skunder ialah sumber data kedua atau data pendukung guna memperkaya data (Samsu, 2017: 95), berupa tulisan – tulisan, data sekolah, visi misi sekolah dan pendukung lainnya. Peneliti menggunakan tiga teknik untuk menggumpulkan data. Yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahap menurut Miles dan Huberman dalam (Muhammad Thoyyib Fuady et al, 2022) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya

Berdasarkan temuan peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka peneliti akan melakukan analisis data

untuk menjelaskan lebih lanjut hasil daripada penelitian yang telah dilakukan. Dibawah ini adalah hasil analisis peneliti tentang implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya sebagai berikut:

1. Implementasi Alur Tujuan Pembelajaran PPKn

Guru PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya memiliki dan menggunakan alur tujuan pembelajaran PPKn sebagai landasan dalam membuat modul ajar PPKn guna implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Dengan adanya alur tujuan pembelajaran PPKn guru bisa melihat alur tujuan pembelajaran PPKn yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun yang sudah dikembangkan oleh guru itu sendiri. Pembuatan alur tujuan pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya dilaksanakan melalui pelatihan seperti bimtek tentang implementasi kurikulum merdeka. Dalam rangka implementasi kurikulum merdeka para guru di SMA Negeri 1 Pringgabaya mendapatkan pelatihan dalam bentuk bimtek untuk memahami dan menerapkan alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran masing-masing termasuk bagi guru PPKn untuk mata pelajaran PPKn. Selain itu, guru PPKn dalam membuat alur tujuan pembelajaran PPKn bisa mengamati, meniru dan memodifikasi alur tujuan pembelajaran PPKn yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Hal tersebut berkorelasi pada fungsi alur tujuan pembelajaran, yaitu sebagai landasan para guru untuk merencanakan pembelajaran dalam hal ini modul ajar (Riswakhuningsih, 2022a). Selain itu, menurut Kemendikbud bahwa pemerintah menyediakan beberapa contoh alur tujuan pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh guru untuk di amati, tiru dan modifikasi guna penyusunan perangkat ajar (Kemendikbud, 2022). Dengan adanya pelatihan dalam bentuk bimtek yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Pringgabaya terkait dengan pembuatan alur tujuan pembelajaran merupakan langkah yang tepat, karena ketidakmampuan guru dalam membuat perangkat ajar dalam hal ini alur tujuan pembelajaran akan berdampak kepada hasil belajar siswa (Kusumawardhana et al., 2022) . Oleh karena itu, pelatihan dalam bentuk bimtek untuk memberikan pemahaman bagi guru di SMA Negeri 1 Pringgabaya, khususnya guru PPKn merupakan langkah yang tepat guna implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn.

Selaras dengan fungsi alur tujuan pembelajaran yaitu sebagai silabus pada kurikulum merdeka, sebagai acuan guru untuk membuat perencanaan pembelajaran atau menjadi modul ajar yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran yang diraih oleh siswa pada akhir fase dan proyek penguatan profil pelajar pancasila (Riswakhuningsih, 2022b). Karena alur tujuan pembelajaran ibarat dengan perjalanan fisik ke suatu tempat, dalam Kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran disebut sebagai capaian pembelajaran. Untuk mencapai capaian pembelajaran, siswa perlu melewati serangkaian jalur tujuan pembelajaran yang telah diatur dengan pengurutan tujuan pembelajaran sebelumnya (Muna & Fathurrahman, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa pembuatan alur tujuan pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya dilakukan melalui pelatihan, seperti bimbingan teknis (bimtek) tentang implementasi kurikulum merdeka. Para guru PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya mendapatkan pelatihan untuk memahami dan

menerapkan alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran PPKn. Guru PPKn dapat mengamati, meniru, dan memodifikasi alur tujuan pembelajaran PPKn yang telah disediakan oleh pemerintah. Alur tujuan pembelajaran PPKn digunakan sebagai landasan dalam membuat modul ajar PPKn, sesuai dengan kurikulum merdeka, guna mencapai capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran berperan sebagai silabus pada kurikulum merdeka, memberikan pedoman bagi guru dalam perencanaan pembelajaran, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa pada akhir fase dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

2. Implementasi Modul Ajar PPKn

Guru PPKn SMA Negeri 1 Pringgabaya menggunakan modul ajar PPKn dalam implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Dalam penggunaannya modul ajar PPKn diselaraskan dengan kebutuhan siswa dan didukung dengan buku ajar siswa sebagai bahan pendukung belajar. Pembuatan modul ajar PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya dilaksanakan dengan melihat modul ajar PPKn yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal ini dari kementerian pendidikan dengan kata lain guru PPKn dalam membuat modul ajar PPKn dengan cara melihat contoh yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa guna implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Guru PPKn SMA Negeri 1 Pringgabaya mendapatkan pelatihan dalam membuat modul ajar PPKn. Hal tersebut didapatkan melalui workshop maupun MGMP PPKn sehingga dengan adanya pelatihan dalam membuat modul ajar PPKn, guru PPKn dapat mengembangkan modul ajarnya sesuai dengan kebutuhan maupun karakteristik siswa. Secara keseluruhan, modul ajar PPKn sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan berupa bimtek, workshop, dan kebebasan dalam mengembangkan modul ajar PPKn diberikan kepada guru PPKn guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan kurikulum merdeka.

Kemudian pelatihan yang didapatkan oleh guru PPKn dalam membuat modul ajar PPKn berkorelasi dengan tingginya tuntutan akan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam kurikulum merdeka telah mendorong pentingnya Bimtek sebagai salah satu solusi bagi individu, instansi, atau lembaga. Bimtek menyajikan seluruh informasi secara operasional dan teknis, disesuaikan dengan kebutuhan peserta, sehingga setelah mengikuti kegiatan Bimtek ini, peserta akan dapat meningkatkan kompetensinya (Mulyanto et al., 2023). Dalam upaya pengembangan modul ajar, seorang guru perlu mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Modul ajar adalah materi pembelajaran yang dirancang secara terstruktur mengikuti kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk unit pembelajaran terkecil yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dalam batas waktu tertentu guna mencapai penguasaan kompetensi yang diajarkan. Berkorelasi dengan pembuatan modul ajar PPKn yang dilakukan oleh guru, menurut (Kesumawati et al., 2021) pembuatan modul sangat penting dan membantu peserta didik dalam pembelajaran oleh karena itu pelatihan pembuatan modul ajar sangat dibutuhkan. Selain itu juga, pembuatan modul ajar yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di kelas (Nadeak & Elfaladonna, 2023).

Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisikan tujuan, langkah-langkah, dan alat bantu pembelajaran, serta penilaian yang diperlukan dalam satu unit atau topik pembelajaran, berdasarkan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Modul ajar serupa dengan RPP atau rencana pembelajaran di kelas. Namun, modul ajar memiliki komponen yang lebih komprehensif dibandingkan RPP, sehingga sering disebut sebagai RPP Plus. Modul ajar memiliki manfaat yang signifikan bagi pendidik diantaranya sebagai berikut:

- a. Membimbing pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran.
- b. Membantu dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
- c. Menyediakan panduan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- d. Menyediakan kerangka kerja yang menjelaskan prosedur dan organisasi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran.
- e. Mendukung pencapaian kompetensi dalam Capaian Pembelajaran dan Profil Pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan dalam suatu mata pelajaran.

Modul ajar juga dapat digunakan sebagai acuan bagi Capaian Pembelajaran pada fase yang sesuai, yang dijelaskan dalam Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Pengampu modul ajar dapat melibatkan wali kelas dan pendidik mata pelajaran (Kemendikbud, 2022). Dengan demikian penggunaan modul ajar dalam kurikulum merdeka merupakan bagian penting yang harus digunakan secara umum dan khususnya pada mata pelajaran PPKn.

Dapat disimpulkan bahwa Pembuatan modul ajar PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya mengacu pada modul ajar yang disediakan oleh pemerintah. Guru PPKn memodifikasi modul tersebut sesuai kebutuhan siswa untuk implementasi kurikulum merdeka. Guru-guru mendapatkan pelatihan untuk membuat modul ajar PPKn melalui workshop dan MGMP PPKn. Modul ajar PPKn sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Pelatihan ini sesuai dengan tuntutan kompetensi guru dalam kurikulum merdeka. Modul ajar PPKn digunakan dengan buku ajar siswa sebagai pendukung pembelajaran, membimbing pendidik, memperlancar proses pembelajaran, dan memberikan panduan serta kerangka kerja.

3. Implementasi Asesmen Pembelajaran PPKn

Salah satu bagian daripada kurikulum merdeka ialah adanya asesmen pembelajaran pada setiap mata pelajaran, salah satunya pada mata pelajaran PPKn. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang menyediakan informasi holistik sebagai untuk pendidik, siswa guna menentukan strategi pembelajaran selanjutnya.

Asesmen dalam mata pelajaran PPKn terdiri dari tiga tahap, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Terdapat tiga tahap perencanaan asesmen, yaitu tahap sebelum pembelajaran (non kognitif dan kognitif), tahap asesmen formatif yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, dan tahap asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran melalui pengamatan guru, tes tulis, atau proyek. Asesmen dalam mata pelajaran PPKn dilakukan melalui tiga tahap, yaitu

asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dilakukan, asesmen formatif selama proses pembelajaran berlangsung, dan asesmen sumatif pada akhir masa pembelajaran atau penilaian akhir.

Pengolahan dari asesmen ini melibatkan nilai dari berbagai aspek seperti performa proses, nilai diskusi, sikap, dan nilai ujian akhir yang digabungkan dari proses yang sudah dilakukan. Dengan demikian, dalam mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya, asesmen menjadi bagian penting dalam proses pengukuran dan evaluasi pencapaian hasil belajar siswa.

Sejalan dengan demikian adapun teknik asesmen formatif maupun sumatif menurut Kemendikbud dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Kinerja
- c. Projek
- d. Tes tertulis
- e. Tes lisan
- f. Penugasan
- g. Portofolio

Menurut Susanti Sufyadi,dkk. (2021:46) asesmen diagnostic dilaksanakan pada awal pembelajaran dan awal lingkup materi, sedangkan asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran, kemudian untuk asesmen sumatif dilaksanakan ketika selesai satu lingkup materi pada akhir fase dan jika diperlukan untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar dan dapat dilakukan pada akhir semester yang berfokus pada kompetensi yang dipelajari selama satu semester.

Dapat disimpulkan bahwa asesmen dalam mata pelajaran PPKn terdiri dari tiga tahap: diagnostik, formatif, dan sumatif. Perencanaan asesmen mencakup tahap sebelum, selama, dan akhir pembelajaran. Proses asesmen melibatkan nilai dari berbagai aspek seperti performa proses, diskusi, sikap, dan ujian akhir. Asesmen menjadi bagian penting dalam pengukuran dan evaluasi hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Teknik asesmen formatif dan sumatif meliputi observasi, kinerja, projek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran, asesmen formatif selama pembelajaran, dan asesmen sumatif pada akhir fase pembelajaran atau akhir semester untuk mengonfirmasi capaian hasil belajar.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Internal

1) Adanyaa Komitmen dari Guru PPKn

Guru-guru PPKn dari SMA Negeri 1 Pringgabaya menyatakan dukungan terhadap kurikulum merdeka, terutama dalam mata pelajaran PPKn yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun bentuk dukungannya yaitu menekankan perlunya peningkatan kompetensi guru dalam aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guna

memberikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga siswa tidak merasa bosan dalam belajar. Selain itu juga, bentuk dukungan guru PPKn mencakup penerapan kurikulum merdeka dalam kegiatan belajar di kelas serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai perangkat-perangkat dalam kurikulum merdeka, termasuk penggunaan modul ajar dan integrasi proyek penguatan pelajar Pancasila dengan profil pelajar Pancasila.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia faktor pendukung ialah suatu hal atau kondisi yang dapat mendukung atau menumbuhkan suatu kegiatan. Dalam implementasi kurikulum merdeka setidaknya ada beberapa faktor pendukung menurut (Iskandar et al., 2023) diantaranya sebagai berikut:

- a. Partisipasi yang aktif dari guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum.
- b. Penyediaan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
- c. Adanya evaluasi atau perbaikan yang dilakukan bahwa kurikulum yang dipakai dapat memenuhi kebutuhan siswa.

Selaras dengan yang disampaikan oleh (Anridzo et al., 2022), bahwa dalam implementasi kurikulum merdeka strategi dari guru sangat dibutuhkan sebagai faktor pendukung dalam pengajaran, membimbing dan membina siswa guna memberikan pembelajaran dan pemahaman yang moderat dan beragam. Berkorelasi dengan hal diatas bahwa faktor pendukung adalah segala pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung yang berperan dalam meningkatkan pendidikan karakter peserta didik yaitu sumber daya manusia, serta sarana dan prasaran sekolah (Doni Angyanur et. al, 2022).

Menurut (Yunita, 2023) pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, terdapat faktor pendukung yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang muncul adalah keberadaan nilai-nilai multikultural yang mengharuskan guru memiliki toleransi yang tinggi penanaman nilai-nilai multikultural didukung dengan fasilitas yang memadai untuk guru dan Selain itu, guru di sekolah mempermudah implementasi kurikulum merdeka belajar. Sementara itu, faktor eksternal yang terkait dengan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan adalah keberagaman siswa dalam hal budaya, daerah, dan sosial.

2) Kualifikasi guru yang memiliki gelar sarjana S-1

Salah satu pendukung implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya, yaitu adanya kualifikasi guru yang mengajar PPKn pada kurikulum merdeka umumnya hanya mencapai gelar sarjana S1. Tidak ada guru PPKn yang memiliki gelar pendidikan tingkat S2. Karena guru merupakan pendidik profesional sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kualifikasi merujuk pada kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas atau memegang suatu posisi. Aspek-aspek kualifikasi mencakup latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang atau subjek yang diajarkan (Jahidi, 2014).

Sejalan dengan demikian, seorang guru atau pendidik yang ahli harus memiliki setidaknya gelar sarjana S1 atau diploma IV, memiliki keahlian

dalam berbagai aspek kompetensi (seperti pedagogi, profesionalisme, keterampilan sosial, dan integritas moral), serta telah memperoleh sertifikat pendidikan, menjaga kesehatan fisik dan jiwa (Lafendry, 2020). Seorang guru SMP/MTs atau SMA/MA harus memiliki setidaknya gelar diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan profesional yang kuat, termasuk penguasaan terhadap materi, struktur, konsep, dan pemahaman mendalam terkait bidang keilmuannya yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan (Masoka & Indriwati, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa Guru PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya memberikan dukungan penuh terhadap penerapan kurikulum merdeka. Mereka mendorong peningkatan kompetensi dan mengambil langkah aktif dalam melaksanakan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Dalam melaksanakan tugas pendidikan, mayoritas guru PPKn yang terlibat memiliki kualifikasi pendidikan hingga tingkat sarjana S-1, sesuai dengan standar keahlian dan kompetensi yang diharapkan dari seorang pendidik profesional. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya berlangsung efektif dan memberikan dampak positif dalam pembelajaran siswa.

b. Faktor Eksternal

3) Adanya sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana menjadi faktor eksternal dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ketersediaan kelas, perpustakaan, serta bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Adanya sarana dan prasarana yang di SMA Negeri 1 Pringgabaya bisa mensukseskan jalannya implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn.

Berkorelasi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azzahra et al., 2023) mengenai implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS di SDN 4 Purwawanangun, bahwa salah satu faktor pendukungnya ialah adanya sarana dan prasarana yang dimiliki. Selajan dengan demikian salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program di sekolah adalah dipengaruhi oleh adanya sarana dan prasarana (Khikmah, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa bahwa adanya sarana dan prasarana merupakan faktor eksternal yang mendukung implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Faktor ini terbukti dengan ketersediaan kelas, perpustakaan, dan bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Pringgabaya, yang berkontribusi dalam kesuksesan implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di sekolah tersebut.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

1) Kurangnya Partisipasi dari Siswa

Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran kurang aktif. Terlihat kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran serta kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran. Secara keseluruhan, pandangan siswa melalui wawancara dan hasil observasi menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam mata pelajaran PPKn. Siswa merasa kurang terlibat, bosan, dan tidak termotivasi dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan demikian, dalam proses pembelajaran, seorang guru sebaiknya mampu menggalakkan aktifitas belajar agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dengan partisipasi siswa yang maksimal, pengalaman belajar dapat dicapai dengan efektif dan efisien (Hikmah, 2020). Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang penting dalam memilih strategi yang tepat untuk menciptakan partisipasi siswa dalam belajar (Betari & Junaidi, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa bahwa partisipasi siswa dalam proses pembelajaran saat ini kurang aktif. Ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi, kurangnya inovasi, dan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam mata pelajaran PPKn. Siswa merasa kurang terlibat, bosan, dan tidak termotivasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menggalakkan partisipasi siswa dengan memilih strategi yang tepat untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien.

2) Kurangnya Jumlah Guru PPKn

Terdapat hambatan sekaligus tantangan signifikan terkait dengan jumlah guru PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Dengan hanya tiga guru PPKn yang aktif, terbagi untuk kelas X, XI dengan kurikulum merdeka, dan kelas XII dengan kurikulum 2013, sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan pembelajaran yang optimal. Penerapan kurikulum merdeka dalam mata pelajaran PPKn menghadapi kendala tertentu. Salah satu kendala utama adalah minimnya jumlah guru PPKn yang tersedia. Pindah tugasnya seorang guru PPKn untuk menjadi kepala sekolah di tempat lain serta tanggung jawab seorang guru PPKn lainnya dalam mengajar kelas XII dengan kurikulum 2013, menyebabkan hanya ada dua guru yang dapat mengajar kurikulum merdeka, masing-masing di kelas X dan XI. Keterbatasan ini menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk mata pelajaran PPKn. Dalam konteks ini, SMA Negeri 1 Pringgabaya menghadapi tantangan yang berarti dalam menjalankan kurikulum merdeka khususnya untuk mata pelajaran PPKn. Kendala ini berasal dari jumlah guru PPKn yang minim dan pembagian tugas pengajaran dengan kurikulum lain. Hambatan sekaligus tantangan ini berdampak pada upaya sekolah dalam memberikan pembelajaran yang optimal sesuai dengan visi kurikulum merdeka.

Berkorelasi dengan hal tersebut, menurut (Damayanti et al., 2022) adapun tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka diantaranya sebagai berikut :

- a. Keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh guru
- b. Menguasai keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital
- c. Pandai dalam mengelola kelas
- d. Refrensi yang terbatas

Menurut (Rahmayumita & Hidayati, 2023) bahwa implementasi kurikulum merdeka tantangan utamanya adalah persiapan guru dan staf sekolah yang perlu ditingkatkan. Pada awal pelaksanaannya, guru dan staf sekolah menghadapi kesulitan dalam mengadopsi paradigma baru dalam proses belajar mengajar dan menyesuaikan administrasi sekolah dengan pedoman kurikulum merdeka.

Dapat disimpulkan bahwa guru PPKn SMA Negeri 1 Pringgabaya dihadapkan pada hambatan sekaligus tantangan serius terkait dengan jumlah guru yang terbatas dalam mata pelajaran PPKn. Dengan hanya tiga guru PPKn yang aktif, mereka harus mengajar berbagai tingkatan, yaitu kelas X, XI yang menggunakan kurikulum merdeka, serta kelas XII dengan kurikulum 2013. Tantangan semakin diperumit oleh perpindahan seorang guru PPKn ke posisi kepala sekolah di tempat lain, sementara seorang guru PPKn lainnya harus mengajar kelas XII dengan kurikulum 2013. Akibatnya, hanya ada dua guru yang tersedia untuk mengajar kurikulum merdeka, masing-masing di kelas X dan XI. Keterbatasan ini menjadi tantangan bagi guru PPKn dalam menerapkan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Selain itu, ada tantangan tambahan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, seperti kebutuhan akan keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh guru, penguasaan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk pembelajaran di era digital, kemampuan dalam mengelola kelas, serta keterbatasan sumber referensi.

- b. Faktor Eksternal

3) Fluktuasi Kebijakan Pemerintah

Fluktuasi kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang menghambat daripada implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Kebijakan pemerintah yang setiap berganti menteri berganti kurikulum, dapat menghambat daripada jalannya suatu kurikulum termasuk kurikulum merdeka.

Berkorelasi dengan adanya fluktuasi kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum adalah salah satu masalah pendidikan di Indonesia (Daga, 2020). Selain itu, dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan yang sudah dilaksanakan tidak dapat membawa dampak memberikan dampak yang baik terhadap kualitas pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah (Setiawati, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kebijakan pemerintah, terutama perubahan kurikulum saat berganti menteri, merupakan faktor eksternal yang menghambat implementasi kurikulum merdeka dalam mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Perubahan kurikulum yang sering terjadi tidak memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan, menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Masalah fluktuasi kebijakan pemerintah terkait kurikulum adalah tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya sudah terlaksana, sebagai berikut :

- A. Kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya sudah diimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan dengan diimplementasikannya alur tujuan pembelajaran PPKn sebagai landasan atau acuan guru dalam membuat modul ajar PPKn, diimplementasikannya modul ajar PPKn sebagai bahan ajar guru PPKn, dan diimplementasikannya asesmen pembelajaran PPKn sebagai penilaian yang dilakukan oleh guru.
- B. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pringgabaya terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung, yaitu : (1) Faktor internal, yakni meliputi dukungan dari guru untuk meningkatkan kompetensinya, menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian adanya kualifikasi pendidikan guru tingkat sarjana S-1 yang menjadikan landasan keprofesionalannya dalam bidang ilmu yang diampu yaitu mata pelajaran PPKn, (2) Faktor eksternal, diantaranya sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi ruang kelas, perpustakaan dan bahan ajar dan lainnya. Sedangkan faktor penghambat yaitu : (1) Faktor Internal, meliputi kurangnya partisipasi dari siswa ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi, kurangnya inovasi, dan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam mata pelajaran PPKn. Selain itu, kurangnya jumlah guru PPKn dengan hanya tiga guru PPKn yang aktif, mereka harus mengajar berbagai tingkatan, yaitu kelas X, XI yang menggunakan kurikulum merdeka, serta kelas XII dengan kurikulum 2013. (2) Faktor Eksternal, meliputi Fluktuasi kebijakan pemerintah terhadap kurikulum akibat dari berganti menteri berganti kebijakan termasuk kurikulum.

Referensi

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habituasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 10–29. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.178>
- Anggito, & Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Asmiati, A., Sumardi, L., Ismail, M., & Alqadri, B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan Studi Anak Pada Masyarakat Nelayan di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 786–793. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.645>
- Azzahra, I., Aan Nurhasanah, & Eli Hermawati. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran IPAS di SDN 4 Purwawinangun. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(2), 6230–6238. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1270>
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Betari, R., & Junaidi, J. (2020). Upaya Meningkatkan Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Model Prediction Guide dengan Media Gambar Kelas X IPS 3 SMAN12 Padang. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i1.62>
- BPS. 2023. Data Susenas Menguak Masalah Pendidikan di Indonesia. [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id). Diakses pada tanggal 5 Januari 2023
- Daga, A. T. (2020). Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 hingga Kebijakan Merdeka Belajar). *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, 4(2), 103–110. <https://doi.org/10.53395/jes.v4i2.179>
- Damayanti, A. D., Jannah, A. N., & Agustin, N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Smp Muhammadiyah 19 Sawangan. *Prosiding Samasta*, 29.
- Hikmah, M. (2020). Penerapan Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Hasil Belajar Pemrograman Dasar Siswa. *Jurnal Teknodik*, 27–38. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i2.376>
- Ilmiah, J., Education, M., Ilmiah, J., & Education, M. (2020). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. 6(1), 126–136.
- Jahidi, J. (2014). KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 2(1), 23–30. <https://jurnal.unigal.ac.id/adpen/article/view/189>
- Kemenkopmk. 2021. *Tingkat Literasi Indonesia Memprihatinkan, Kemenko PMK Siapkan Peta Jalan Pembudayaan Literasi Nasional*. <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia->
-

memprihatinkan-kemenko-pmk-siapkan-peta-jalan-pembudayaan-literasi. Diakses pada tanggal 5 Januari 2023

- Kesumawati, N., Destiniar, Octaria, D., Yunika, L. N., Fitriasari, P., Septiani Mulbasari, A., Dei Nopriyanti, T., & Marga Retta, A. (2021). Pelatihan pembuatan modul ajar bagi guru SMA/SMK di Tebing Tinggi. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 246–256. <https://doi.org/10.29408/ab.v2i2.4589>
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3, 123–130. <https://doi.org/10.17977/um027v3i22020p123>
- Kusumawardhana, B., Hudah, M., Setiawan, D. F., Widiyatmoko, F. A., & Royana, I. F. (2022). Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Bagi Guru PJOK Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat (JPOM)*, 3(2), 82–88. <https://doi.org/10.26877/jpom.v3i2.13926>
- Lafendry, F. (2020). Kualifikasi dan kompetensi guru dalam dunia pendidikan. *Tarbawi*, 3(3), 1–16. <https://stai-binamadani.ejournal.id/Tarbawi/article/view/166>
- Masoka, M., & Indriwati, S. E. (2017). *Kompetensi Guru Bidang Studi Biologi Smp — Sma Sebagai Basis Program*. 4, 516–523.
- Muhammad Thoyyib Fuady, H. A. F. B. A., 2022. Peran Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaran Dalam Peningkatan Soft Skill. *Manazhim*, 4(2), pp. 295-307.
- Mulyanto, A., Dewi, O. R., Normansyah, A. D., & ... (2023). Bimbingan Teknis Guru dan Kepala Sekolah Dalam Menyusun Modul Ajar Pada Kurikulum Merdeka. ... *Journal of Civil ...*, 5(1), 72–82. <https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.1697>
- Muna, I., & Fathurrahman, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Matematika di SD Nasima Kota Semarang. *Jurnal Profesi Keguruan*, 9(1), 99–107.
- Nadeak, E., & Elfaladonna, F. (2023). *Pelatihan Pembuatan Modul Ajar Interaktif Bagi Guru dengan Menggunakan Canva (Studi Kasus : SDN 204 Palembang)*. 2(3), 201–206.
- Rahmayumita, R., & Hidayati, N. (2023). *Kurikulum Merdeka : Tantangan dan Implementasinya pada Pembelajaran Biologi*. 3(1), 1–9.
- Riswakhayuningsih, T. (2022a). Pengembangan Alur Tujuan Pembelajaran (Atp). *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 7(1), 20–30. <http://ojs.batangkab.go.id/index.php/ristek/article/view/123/225>
- Riswakhayuningsih, T. (2022b). Pengembangan Alur Tujuan Pembelajaran (Atp) Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) Kelas Vii Smp. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 7(1), 20–30.

<http://ojs.batangkab.go.id/index.php/ristek/article/view/123>

- Saleh, M. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1(1), 51–56.
- Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaran di Sekolah. *Nizamul 'Ilmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)*, 07(1), 1–17.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157.
<https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>
-